

BAB I

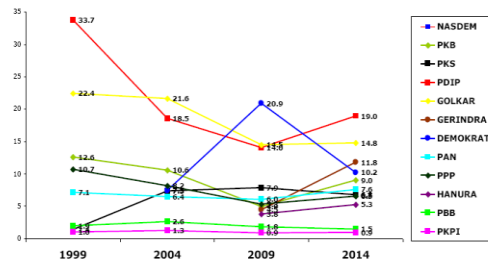
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi, masalah utama yang di hadapi oleh partai politik adalah mempertahankan dukungan suara. Meskipun, Indonesia telah menetapkan sistem *multipartai* sejak tahun 1997 namun hingga kini dukungan suara bagi partai politik ternyata menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan. Penurunan suara partai politik bersumber dari pemilih, sebagaimana yang di ketahui bahwa salah satu kekuatan yang harus di miliki oleh partai politik terletak pada dukungan massa, namun realitanya dukungan massa bersifat dinamis bisa berubah sesuai dengan kehendak, kewewengan dan keinginan dari pemilih. Berdasarkan data perolehan suara yang di peroleh partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 pada tingkat nasional, partai politik berlomba-lomba mencari dukungan massa untuk memperoleh suara dari pemilih melalui berbagai program-program kerja dengan mengedepankan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi untuk mengantisipasi terjadinya penurunan suara.

Berikut data perolehan suara partai politik oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) di tingkat nasional dari tahun 1999-2014, dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Grafik Perolehan Suara Partai Dirilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) Dari Tahun 1999-2014 Dalam Skala Nasional

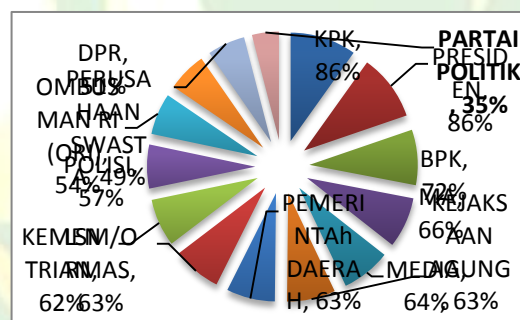


Berdasarkan grafik 1.1 bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh partai PKS dari tahun 1999 sebesar 10,7%, 2004 sebesar 8,2%, 2009 sebesar 7,9% dan tahun 6.8%. sedangkan PAN tahun 1999 sebesar 7,1%, 2004 sebesar 6.4%, 2009 sebesar 6.0%, 2014 sebesar 7.6%. Dan untuk partai Demokrat perolehan suara partai tahun 1999 sebesar 10,7%, 2004 sebesar 8,2%, 2009 sebesar 7,9%, 2014 sebesar 6.8%. Maka dapat di lihat dari grafik di atas bahwa sejak tahun 1999-2014 menurut survey LSI perolehan suara PKS, PAN, dan Demokrat secara nasional menunjukkan data penurunan suara sejak dilangsungkannya pemilihan umum tahun 1999-2014 termasuk pemilihan legislatif.

Akhirnya, penyebab terjadi penurunan suara pada partai politik karena di cabutnya legitimasi yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik. Menurut Parsons legitimasi merupakan *output* yang dihasilkan oleh sub sistem pola pemeliharaan (*patten-maintenance*) yang dibutuhkan sebagai *input* oleh sub sistem pencapaian tujuan (*Goal-attainmant*) (Harbermas,1975:10). Sedangkan Easton mengemukakan bahwa keabsahan dan legitimasi ialah keyakinan dari pihak anggota bahwa sudah wajar baginya menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (Budiardjo, 2008:64-65). Idealnya

legitimasi adalah pemberian kekuasaan dalam wujud kepercayaan kepada partai politik yang bersumber dari pemilih, dan pemilih mempunyai hak untuk memberikan pilihan sesuai dengan ideologi maupun integritas yang di miliki oleh partai politik. Berdasarkan fenomena yang berkembang saat ini bahwa legitimasi yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik semakin lama semakin tidak mendapatkan tempat di hati pemilih, hal itu di dukung oleh hasil survey kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara di Indonesia (<http://nasional.tempo.com> di akses pada tanggal 23 September 2018 jam 18:09 WIB) dapat di lihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1.1
Survey Kepercayaan Publik Kepada Lembaga-Lembaga Negara Di Tingkat Nasional Tahun 2014



Berdasarkan diagram 1.1 tingkat kepercayaan publik pada tahun 2014 diposisi teratas diperoleh oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 86%, BPK sebesar 73%, Mahkamah Agung sebesar 66%, Media sebesar 64%, Pemerintah Daerah sebesar 63%, Kejaksaan dan LSM sebesar 63%, Kementerian sebesar 62%, Polisi sebesar 57%, Ombusman sebesar 54%, DPR sebesar 51%, Perusahaan Swasta 49%, sedangkan untuk tingkat kepercayaan publik yang paling rendah di peroleh oleh partai politik sebesar 35%.

Bagi partai politik yang diperlukan bukan hanya legitimasi dalam bentuk pemberian suara, akan tetapi yang menjadi faktor penghambat lain bagi partai politik dalam pemilihan umum dengan diberlakukannya *parliamentary threshold*. *Parliamentary Threshold* merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik pada pemilihan umum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta dalam penentuan perolehan kursi di lembaga DPR, DPD dan DPRD. *Parliamentary Threshold* pertama kali diterapkan pada tahun 2004 dengan nama *electoral threshold* sebesar 3% berpatokan pada pemilihan legislatif tahun 1999, dan pada tahun 2009 *electoral threshold* berganti nama menjadi *parliamentary threshold* sebesar 2.5%. Berdasarkan pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 dan pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 *parliamentary threshold* pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 3,5% yang berlaku secara nasional (<http://ejournal.politik.lipi.go.id> di akses pada tanggal 14 Oktober 2017 jam 15:30 WIB).

Pada pemilihan legislatif tahun 2004 di Kota Padang, jumlah partai politik partai yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam pemilihan legislatif sebanyak 220 partai akan tetapi hanya 24 partai yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum (<http://repositoty.unp.ac.id> di akses pada tanggal 17 Agustus 2018 jam 19:00 WIB). Berikut merupakan penyajian partai pemenang dan perolehan kursi dalam pemilihan legislatif tahun 2004 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Partai Pemenang Dan Perolehan Kursi Dalam Pemilihan
Legislatif Tahun 2004 Di Kota Padang

No	Partai Politik	Jumlah kursi	Presentase %
1	Partai Keadilan Sejahtera	11	24.44
2	Partai Amanat Nasional	9	20.00
3	Partai Golongan Karya	8	17.78
4	Partai Persatuan Pembangunan	5	11.11
5	Partai Demokrat	5	11.11
6	Partai Bulan Bintang	3	6.67
7	Partai Keadialan Persatuan Indonesia	2	4.44
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	4.44
Jumlah		45	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004

Berdasarkan tabel 1.1 partai PKS memperoleh kursi terbanyak yang berjumlah 11 kursi dengan presentase suara 24.44%, PAN 9 kursi (20,00%), Partai Golkar 8 kursi (17,78%), PPP 5 kursi (11,11%), Partai Demokrat 5 kursi, PBB 3 kursi (6,67%), PKPI 2 kursi (4.44%), dan PDIP memperoleh kursi paling sedikit yaitu 2 kursi dengan presentase suara (4.44%), Dari 45 orang jumlah anggota DPRD Kota Padang, 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.

Pada tahun 2009 dalam pemilihan legislatif jumlah partai yang ikut sebanyak 37 partai, dan hanya 9 partai yang memperoleh kursi di lembaga legislatif dengan total 45 kursi. Berikut merupakan penyajian partai pemenang dan perolehan kursi dalam pemilihan legislatif tahun 2009 di Kota Padang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Partai Pemenang Dan Perolehan Kursi Dalam Pemilihan
Legislatif Tahun 2009 Di Kota Padang

No	Partai Politik	Kursi	Perolehan Suara	Presentase %
1	Partai Demokrat	17	111.469	33,59
2	Partai Hati Nurani Rakyat	4	13.390	4,03
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	11.631	3,50
4	Partai Keadilan Sejahtera	6	39.638	11,94
5	Partai Amanat Nasional	5	39.205	11,81
6	Partai Golongan Karya	5	29.413	8,86
7	Partai Persatuan Pembangunan	3	13.571	3,79
8	Partai Bulan Bintang	2	13.916	3,50
9	Partai Demokrasi Indonesia P	1	7.174	2,16
	Jumlah	45		100%

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Tahun 2004

Berdasarkan tabel 1.2 partai Demokrat memperoleh sebanyak 17 kursi dengan presentase suara 33,59%, Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 4 kursi Partai dengan presentase suara 4,03%, Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 2 kursi dengan presentase suara 3,50%, PKS memperoleh 6 kursi dengan presentase suara 11,94%, PPP memperoleh 3 kursi dengan presentase suara 3,79%, PAN memperoleh 5 kursi dengan presentase suara 11,81%, Partai Golkar memperoleh 5 kursi dengan presentase suara 11.81%, PBB memperoleh 2 kursi dengan presentase suara 3,50%, dan PDIP memperoleh 1 kursi dengan presentase suara 2,16%. Pada pemilihan legislatif 2009 jumlah perempuan yang duduk DPRD Kota Padang hanya 3 orang yaitu: Rahayu Purnawati (PKS dapil V), Gustin Paramona (Demokrat dapil III), dan Paula Lindawati (Demokrat dapil 1).

Sedangkan pada tahun 2014 partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan legislatif berjumlah 12 partai politik dengan total perolehan kursi

sebanyak 45 kursi. Dasar pelaksanaan pemilihan legislatif di atur dalam UUD No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten dan kota tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Berikut merupakan data perolehan kursi dan partai pemenang dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Padang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Partai Pemenang Dan Perolehan Kursi Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kota Padang

No	Partai Politik	Kursi	Perolehan Suara	Presentase %
1	Partai Amanat Nasional	6	36.389	10,76
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	44.538	13,17
3	Partai Nasdem	4	20.543	6,08
4	Partai Kebangkitan Bangsa	1	15.339	4,55
5	Partai Keadilan Sejahtera	5	39.022	11,54
6	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	3	20.219	5,98
7	Partai Golongan Karya	5	39.658	11,73
8	Partai Hati Nurani Rakyat	5	30.156	8,92
9	Partai Demokrat	5	30.306	11,33
10	Partai Persatuan Pemangunan	4	32.378	9,58
11	Partai Bulan Bintang	1	14.485	4,19
12	Partai Keadilan Persatuan Indo	0	6.968	2,06
	Jumlah	45	338.056	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2014

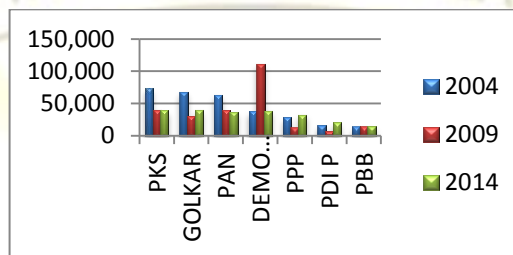
Berdasarkan tabel 1.3 Partai Golkar memperoleh 6 kursi dengan perolehan suara sebanyak 39.658 atau 11,73%. PKS memperoleh 5 kursi dengan perolehan suara sebanyak 339.022 atau 11,54%, Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 6 kursi dengan perolehan suara sebanyak 44.538 atau 3,50%, Partai Nasdem memperoleh 4 kursi dengan perolehan suara sebanyak 20.543 atau 6,08%, PDIP memperoleh 3 kursi dengan perolehan suara sebanyak 20.219 atau 5,98%, Partai Golkar memperoleh 5 kursi dengan perolehan suara sebanyak

39.658 atau 11,73%, Partai Hanura memperoleh 5 kursi dengan perolehan suara sebanyak 30.156 atau 8,92%, Partai Demokrat memperoleh 5 kursi dengan perolehan suara sebanyak 30.306 atau 11,33%, PPP memperoleh 4 kursi dengan perolehan suara sebanyak 32.378 atau 9,58%, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh satu kursi dengan perolehan suara sebanyak 15.339 atau 4,55, PBB memperoleh satu kursi dengan perolehan suara sebanyak 14.485 atau 14,85%, dan PKPI tidak memperoleh kursi di lembaga legislatif karena perolehan suara yang didapatkan kurang dari 3,5% sesuai dengan ketentuan *parliamentary threshold* tahun 2014. Dan anggota DPRD berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang yaitu: Gustin Pramona (Demokrat dapil I), Mailinda Rose (Nasdem dapil I), Dian Anggaraini (Nasdem dapil II), Dewi Susanti (Gerindra dapil III), Elly Triyanti (Gerindra dapil III), Yuhilda Darwis (PPP dapil 1), dan Nila Kartika (PPP dapil III). Oleh karena itu, partai politik berlomba-lomba mendapatkan suara terbanyak dengan target 3,5% dari batas ambang parlemen (*parliamentary threshold*) agar partai politik mendapatkan kursi di lembaga legislatif (<https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 21 September 2017 jam 18:00 WIB).

Pemilihan secara langsung khususnya pemilihan legislatif telah diselenggarakan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2004, 2009, dan 2014, tanpa terkecuali juga dilaksanakan di Kota Padang. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara terdapat 7 partai yang selalu bertahan dalam pemilihan legislatif di Kota Padang yaitu Partai Keadilan Sejahteraan (PKS), Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB). Berikut

merupakan data perbandingan perolehan suara partai politik yang selalu bertahan dari tahun 2004, 2009, dan 2014 dalam pemilihan legislatif dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Diagram 1.2
Data Perbandingan Perolehan Suara Partai Yang Selalu Bertahan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padang Tahun 2004, 2009, Dan 2014

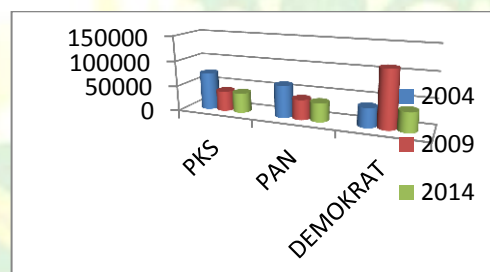


Sumber: KPU Kota Padang Tahun 2004, 2009, Dan 2014

Berdasarkan diagram 1.2, Partai Bulan Bintang (PBB) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 14.203, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 13.916, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 14.485 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 15.747, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 7.174, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 20.219, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 27.931, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 12.571, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 32.378, Demokrat tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 37.620, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 111.469, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 38.308, Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 62.923, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 39.205, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 36.389.

Partai Golongan Karya (Golkar) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 67.807, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 29.413, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 39.658 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 73.543, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 39.638, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 39.002 suara. Dari tujuh partai yang selalu bertahan dalam pemilihan legislatif ada tiga partai yang selalu mengalami penurunan suara pada pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 di Kota Padang yaitu PKS, PAN, dan Demokrat. Berikut adalah data perbandingan perolehan suara dari PKS, PAN dan Demokrat dapat di lihat pada diagram berikut:

Diagram 1.3
Data Perbandingan Perolehan Suara Dari PKS, PAN Dan Demokrat
Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2004, 2009, 2014 Di Kota Padang



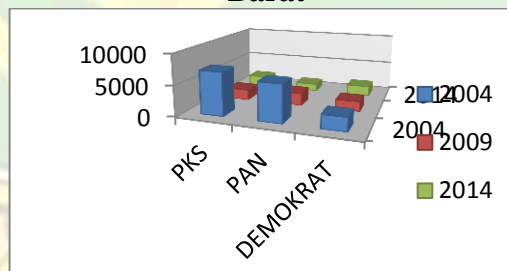
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Berdasarkan diagram 1.2 PKS pada tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 73.453, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 39.638, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 39.002, sedangkan PAN pada tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 62.923, tahun 2009 memperoleh suara sebanyak 39.205, tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 36.389, dan Demokrat pada tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 37.620, tahun 2009 memperoleh suara

sebanyak 111.469, dan pada tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 38.308 suara.

Penurunan perolehan suara PKS, PAN, dan Demokrat tidak hanya terjadi pada nasional dan Kota Padang saja akan tetapi juga terjadi di tingkat kecamatan yang ada di Kota Padang salah satunya yaitu Kecamatan Padang Barat. Alasan memilih Kecamatan Padang Barat Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena PKS, PAN dan Demokrat mendapatkan perolehan suara yang cenderung mengalami penurunan suara yang sangat signifikan dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 di Kecamatan Padang Barat, pemilih paling heterogen dan kosmopolitan. Berikut merupakan data perbandingan perolehan suara dari partai PKS, PAN, dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat dapat di lihat pada tabel berikut:

Diagram 1.4
Data Perbandingan Perolehan Suara Dari PKS, PAN Dan Demokrat Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2004, 2009, 2014 Di Kecamatan Padang Barat



Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat 2004, 2009, Dan 2014

Berdasarkan diagram 1.4 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, PKS tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 7.096, tahun 2009 perolehan suara sebanyak 1.763, dan tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 1.778 suara. PAN memperoleh suara tahun 2004 sebanyak 6.151, tahun 2009 sebanyak 2.081 suara, sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.230 suara. Partai Demokrat memperoleh

suara tahun 2004 sebanyak 2.224, tahun 2009 sebanyak 1.661, dan tahun 2014 memperoleh suara sebanyak 1.668 suara.

Penelitian tentang legitimasi sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Desty Sartika Putri tentang Kepercayaan dan Legitimasi Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 yang didasarkan pada kewenangan yang mengarahkan pada kepercayaan yang di akui secara legitimasi. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan legitimasi partai PKS, PAN, dan Demokrat studi perolehan suara dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009 di mata pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat dan pengurus aktif dari PKS, PAN dan Demokrat. Pentingnya penelitian ini di teliti *Pertama*, agar dapat memahami gejolak politik yang sedang di alami oleh pemilih dalam penurunan suara pada pemilihan legislatif yang berkaitan dengan legitimasi politik, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai legitimasi politik di mata pemilih di Kecamatan Padang Barat. *Kedua*, antara pemilih dan partai politik merupakan pondasi utama jalannya sistem kehidupan bermasyarakat, maka keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh sistem pemerintahan saja tetapi juga ditentukan oleh motivasi untuk menjamin keberlangsungan sistem sosial. *Ketiga*, penelitian mengenai legitimasi partai politik studi perolehan suara pada PKS, PAN, dan Demokrat pada pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, 2014 belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai penurunan suara partai politik.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Andrian dalam (Ranjabar, 2016:173), legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga dibutuhkan oleh unsur-unsur lain di dalam sistem politik. Ada empat objek di dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. *Pertama* struktur-struktur politik termasuk masyarakat politik dan lembaga politik, *Kedua* keyakinan-keyakinan, baik nilai (kebebasan dan atau kesamaan) maupun norma-norma hukum (Undang-Undang), *Ketiga* kekuasaan oleh orang-orang tertentu, *Keempat* kebijakan-kebijakan pemerintah.

Apabila berbicara mengenai struktur-struktur politik termasuk di dalamnya lembaga politik, legitimasi tidak hanya bersumber dari UUD tetapi juga bersumber dari pemilih dalam bentuk pemberian suara. Untuk menjamin partai politik dapat terus populer dalam berbagai kegiatan politik strategi digunakan adalah dengan cara menarik hati pemilih melalui berbagai program-program berbasis kepentingan umum agar partai politik dapat memperoleh suara yang tinggi dalam setiap pemilihan umum. Kesulitan terbesar bagi keberlangsungan jalannya sebuah organisasi politik bukan hanya untuk mendapatkan dukungan suara lebih dari itu mempertahankan kelayaitasan massa menjadi tantangan lain yang belum mampu terselesaikan, karena pemilih dapat pula menentukan sesuatu kekuasaan di teruskan atau di cabut. Hal itu dapat di lihat dari penurunnya perolehan suara PKS, PAN, Demokrat secara signifikan di Kecamatan Padang Barat dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Partai-Partai Politik Mengalami Penurunan Perolehan Suara Di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan legitimasi partai-partai politik di Kota Padang

2. Tujuan Khusus

Dalam mencapai tujuan penelitian ini peneliti memiliki dua tujuan khusus sebagai berikut ini:

1. Mendeskripsikan legitimasi PKS, PAN, dan Demokrat di mata pemilih Kecamatan Padang Barat
2. Menjelaskan penyebab penurunan suara PKS, PAN, dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini ialah sebagai referensi bagi karya ilmiah lainnya dengan tema penelitian yang sama. Oleh sebab itu penulis berupaya untuk menjadikan tulisan ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu pengetahuan sosiologi politik.

2. Manfaat Praktis

1. Menjadi masukan bagi penulis lain yang berminat meneliti tentang permasalahan ini lebih lanjut
2. Sebagai bahan masukan, informasi dan pedoman bagi individu, masyarakat, maupun pihak berkepentingan dalam mempertimbangkan berbagai hal berkaitan dengan permasalahan legitimasi PKS, PAN, dan Demokrat dalam studi penurunan suara.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Legitimasi

Legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum, secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan atau aturan yang menyangkut keabsahan di dalamnya mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang yang di anggap benar atau sah. Dalam artian lain legitimasi merupakan sebuah proses menjadikan sesuatu dapat di terima, tepat dan benar secara moral di mata masyarakat umum (Newton dan Deth, 2016:175).

Legitimasi diidentik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim. Jadi legitimasi merupakan kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Legitimasi tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, tetapi dapat pula dibutuhkan oleh unsur-unsur lain di dalam sistem politik. Menurut Weber legitimasi mengarah pada otoritas legal-rasional yang menghubungkan antara kepercayaan terhadap legitimasi sebuah tatanan (*ordnungen*) beserta kemampuannya untuk menjustifikasi di satu sisi, dan kesahihan faktualnya di sisi lain (Habermas, 2004:274). Legitimasi sebagai landasan paling mendasar dari “kesahihan” yang mendominasi, dengan kata lain kekuasaan menjadi sebuah pondasi yang di dalamnya ada aturan bersifat mengikat di buat oleh penguasa dan di patuhi oleh orang-orang yang telah memberikan legalitas kepada penguasa.

1.5.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan proses di mana rakyat dalam sebuah negara melakukan pemilihan terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan atau memilih pimpinan pemerintahnya. Dalam Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum didefinisikan sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KPU, 2015:14).

Pemilihan umum sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum sebagai ajang demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan keinginan rakyat yang didasarkan pada kesadaran politik, bukan karena faktor uang (*money politik*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hati nurani (KPU, 2015:22). Pemilihan legislatif adalah suatu pemilihan umum untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, di anggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo,2008:461).

1.5.3 Partai Politik

Partai politik didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki instrumen perjuangan nilai atau ideologi, dan sebagai alat perjuangan atas sebuah nilai yang diyakini kebenarannya oleh individu yang berada dalam organisasi, yang

memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempersebut kekuasaan politik melalui berbagai program-program kerja yang telah di buat sebelumnya. Menurut Neumann partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Dengan demikian partai politik salah satu perantara untuk menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas (Budiardjo,1998:16-17).

Secara hakikatnya partai politik terdiri dari organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri dalam percaturan politik. Idealnya partai politik sendiri berfungsi menampung seluruh aspirasi dari masyarakat keseluruhan (Duverger, 1981:VII). Sistem politik moderen di akui karena sejumlah ciri khas dan inovatif, ruang lingkup dan vitalitas organisasinya tapi mereka mendefinisikan secara hierarki, jaringan komunikasi yang luas, komitmen pemimpin yang berlebihan terhadap tujuan organisasi dan peringkat pertumbuhan sebagai karakteristik makna historis tunggal (Orum, 1989:206). Partai politik moderen di tandai oleh partisipasi masyarakat yang luas, berdasarkan nilai-nilai dasar, instrument, organisasi, mekanisme dan prosedur yang bersifat terbuka, serta aturan-aturan yang di buat berdasarkan kesepakatan bersama berlaku secara adil (Setiadi dan Kolip, 2013:36).

Dalam negara moderen seperti Inggris, sistem partai politik yang dijalankan bukan berdasarkan keturunan, ras, agama, setia kepada tugas, dan tujuan organisasi, melainkan tercipta melalui sistem politik moderen yang mampu mewedahi perbedaan pemahaman, pandangan, mengatasi masalah dengan cara adab dan damai dalam aturan yang di sepakati bersama (Setiadi dan Kolip, 2013:37). Sedangkan sistem partai politik di Indonesia lahir dengan presentasi nilai dan kepentingan satu kelompok dalam yang mengarah kepada nilai dan kepentingan elit yang parsial, persaingan kepentingan antara elit, balas dendam sakit hati dalam kepentingan politik, dan sistem kepartaian yang terkarteliasi oleh ideologi-ideologi partai politik yang diarahkan pada satu ideologi yang sama (Ambardi, 2009:246). Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik Indonesia menggunakan sistem tradisional dengan *multipartai* partai yang terkartelisasi melalui berbagai koalisi partai untuk mencapai kepentingan pribadi melalui organisasi politik.

Dalam negara demokratis khususnya di Indonesia partai politik memiliki tujuh fungsi utama sebagai sarana dalam sistem politik dapat di lihat sebagai berikut:

1. Komunikasi Politik

Kedudukan partai adalah sebagai jembatan penghubung kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peranan penting dari partai politik harus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada seluruh masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.

2. Sosialisasi Politik

Fungsi ini adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum, apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang mendidik bagi anggota-anggotanya dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum.

3. Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik dengan pemimpin internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin baru.

4. Pengatur Konflik (*Conflict Managemen*)

Peran partai politik diperlukan untuk membantuaatau sekurang-kurangnya mampu menekan pandangan yang bersifat negatif.

5. Mobilisasi Rakyat Untuk Berpartisipasi

Partai politik memainkan peran penting dalam menggerakkan massa untuk menggunakan hak suara, berpartisipasi dalam organisasi politik baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga memobilisasi warga negara untuk terlibat dalam aktivitas politik.

6. Agregasi Kepentingan Politik

Fungsi agregasi kepentingan merujuk pada aktivitas partai politik untuk menggabungkan dan menyeleksi tuntutan kepentingan dari berbagai kelompok sosial di dalam alternatif-alternatif kebijakan atau program pemerintah.

7. Kontrol Politik

Fungsi ini berkaitan dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan dalam wujud penyeksian individu-individu yang akan menempati jabatan politik untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. (Pamungkas, 2011:16-19).

1.5.4 Perspektif Sosiologi

Pada penelitian ini ingin mendeskripsikan legitimasi partai-partai politik Di Kota Padang menggunakan perspektif sosiologi dalam paradigma definisi sosial tentang legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber dan teori *Crisis Legitimasi* dari mahzab *Frankfurt* oleh Jurgen Habermas. Menurut Weber wewenang mengarah pada hubungan antara kepercayaan terhadap legitimasi sebuah tatanan (*ordnungen*) beserta kemampuannya untuk menjustifikasi di satu sisi, dan kesahihan faktualnya di sisi lain (Habermas, 2004:274). Pada hakekatnya konsep legitimasi mengacu pada otoritas legal-rasional, rasionalitas hanya dalam bentuk dekade saja namun bisa dikaburkan menjadi kekuasaan legal-rasional yang tidak netral nilai dan murni rasional bertujuan. (Habermas, 2004:283).

Sedangkan krisis dianggap muncul kalau struktur sebuah sistem sosial tidak menghasilkan kemungkinan untuk memecahkan masalah dari pada apa yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan sistem itu (Hardiman, 1993:141). Habermas memandang krisis sebagai kontradiksi-kontradiksi yang melekat dalam sistem itu dan pada gilirannya bisa mengubah sistem sosial itu sendiri, krisis merupakan fenomena yang objektif sekaligus eksternal, dengan kata lain krisis harus di lihat dengan dua paradigma yaitu paradigma dunia-kehidupan

(*labenswelt*) dan paradigma sistem. Dengan perpektif dunia-kehidupan (*labenswelt*) akan menyoroti struktur-struktur normatif (nilai-nilai dan institusi-institusi) masyarakat sedangkan dalam perspektif paradigma sistem melihat mekanisme-mekanisme pengendalian masyarakat. Jadi, sistem sosial di lihat sebagai dunia kehidupan (*labenswelt*) sebuah dunia yang dihayati oleh para anggotanya dan terstruktur secara simbolik, dalam masyarakat kapitalis terjadi krisis keluaran dalam bentuk krisis rasionalitas, yakni sistem administrasi tak mampu mendamaikan dan memenuhi imperatif-imperatif sistem ekonomi. Krisis masukannya (*input*) dalam bentuk krisis legitimasi, yaitu sistem legitimasi tak berhasil mempertahankan loyalitas (kesetian) massa.

Krisis legitimasi adalah defisit legitimasi yaitu tidak memungkinkan sarana administratif menjaga atau menetapkan suatu struktur-struktur normatif yang di dukung oleh motivasi yang cukup, maka itu krisis legitimasi disebabkan oleh krisis motivasi, dan krisis motivasi diakibatkan oleh perubahan-perubahan sistem sosio-kultural yang mengikis makna. Krisis legitimasi ditimbulkan oleh kebutuhan terhadap legitimasi yang muncul dari perubahan-perubahan dalam sistem politik (bahkan ketika struktur-struktur normatif masih tidak berubah) dan tidak dapat di penuhi oleh legitimasi yang ada (Habermas, 2004:185). Berikut tabel yang menjelaskan kecenderungan krisis yaitu:

Tabel 1.4
Kecenderungan-Kecenderungan Krisis

Asal-Usul	Krisis Sistem	Krisis Indentitas
Sistem Ekonomi	Krisis Ekonomi	-
Sistem Politik	Krisis Rasionalitas	Krisis Legitimasi
Sistem Sosio-	-	Krisis Motivasi

Jadi dalam pemahaman tentang penurunan suara PKS, PAN dan Demokrat tidak bisa di lihat dari satu sisi saja, tetapi harus dalam satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan legitimasi PKS, PAN, dan Demokrat di mata pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat, dan menjelaskan penyebab penurunan suara PKS, PAN, dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat dengan mewawancarai pengurus aktif dari PKS, PAN, dan Demokrat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Hermeneutik Hans-George Gadamer sehingga penulis mampu menafsirkan makna di balik kata-kata, ekspresi dan tindakan-tindakan agar penulis dapat menarik kesimpulan bukan berdasarkan prasangka penulis sendiri melainkan berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan tanpa meninggalkan pengetahuan kekinian dari penulis.

1.5.5 Penelitian Relevan

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Desty Sartika Putri/ 2016	Kepercayaan Dan Legitimasi Pemilihan Dalam Pemilu Kadeh Kabupaten Tanah Datar .	Kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilu Kadeh Tanah Datar didasarkan pada kewenangan yang mengarahkan pada kepercayaan yang di akui secara legitimasi.
Muhandi/ 2013	Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibnu Khaldun.	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi berangkat dari suatu proses yang alamiah dalam diri seorang manusia dan kekuasaan sang pemilik kekuasaan mutlak hanya ada di tangan Allah SWT.

George Towar Ikkal Tawakkal/ 2009	Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009.	Bentuk mobilisasi yang digunakan adalah Penggunaan jalur persaudaraan, keagamaan tetangga, pekerjaan, dan lain sebagainya.
Diaz Afriansyah/ 2015	Saluran Komunikasi Politik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2004-2014 Di Kota Padang	Dalam melakukan komunikasi politik dalam di setiap pemilihan legislatif tahun 2004-2014 partai Demokrat menggunakan 2 saluran komunikasi yaitu saluran tatap muka dan dunia massa
BiwaOkta Brando/2017	Dominasi Politik Partai Golkar Di Kota Solok 1999-2014.	Dominasi partai politik tidak terlepas dari kemampuan organisasi partai yang terstruktur serta sistematis dengan pola kaderisasi , dominasi partai Golkar mereka tidak hanya dari sisi Eksekutif tetapi juga berakar pada sisi Legislatif sehingga partai Golkar merupakan partai dengan pemilik suara terbanyak di DPRD Kota Solok.

Sumber: Data Sekunder 2018

Berdasarkan tabel 1.3 *Pertama* penelitian oleh Desty Sartika Putri (2016), tingginya tingkat partisipasi masyarakat didasarkan pada kewenangan yang mengarah kepada kepercayaan yang di akui secara legitimasi yaitu kewenangan legal-rasional yang didasarkan daerah asal, calon aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan jabatan yang di miliki oleh pasangan calon sebelumnya. Masyarakat nagari Labuah cenderung memilih secara rasional dari calon yang ada serta di dukung dari program unggulan yang ditawarkan pasangan calon kepada masyarakat.

Kedua penelitian oleh Muhliadi (2013), menjelaskan kekuasaan dan legitimasi politik menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan dan legitimasi berangkat dari proses yang terbentuk secara alamiah yang bersumber dari diri manusia itu sendiri kemudian legitimasi juga di dorong oleh kekuasaan yang mutlak di luar diri manusia, bahkan manusia tidak hanya memiliki kekuasaan atas kemauan sendiri melainkan atas kekuasaan yang hanya di miliki oleh Allah SWT. Selain kekuatan dari Allah, kekuasaan seseorang di dukung oleh solidaritas sosial yang mendorong lahirnya cita-cita untuk bekerja sama dalam memenuhi segala kebutuhan manusia, namun di setiap kekuasaan memiliki jangka waktu secara alamiah mulai dari tahap lahir, berkembang, menjadi tua, hancur (diperebutkan) dan siklus ini akan berulang untuk kekuasaan di masa mendatang.

Ketiga penelitian oleh George Towar Iqbal Tawakkal (2009), penelitian ini menjelaskan tentang peran partai politik dalam memobilisasi pemilih. Adapaun bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh partai maupun calon legislatif adalah menggunakan jalur persaudaraan, penggunaan dalam hubungan keagamaan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Munculnya berbagai bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif di landasi oleh beberapa hal *Pertama*, kerasnya persaingan antar calon legislatif memaksa caleg melakukan berbagai macam bentuk mobilisasi untuk dapat memperebutkan suara pemilih yang berkemungkinan sama. *Kedua*, keterbukaan pemilih untuk menjadi sasaran mobilisasi.

Keempat penelitian oleh Biwa Okta Brando (2017), penelitian ini menjelaskan Dominasi Politik Partai Golkar Di Kota Solok Periode 1999-2014.

Dominasi berpengaruh pada perolehan suara di lembaga Eksekutif maupun lembaga Legislatif dengan mendapatkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Solok, terdapat tiga bentuk dominasi partai Golkar di Kota Solok yaitu: *pertama*, dominasi politik partai Golkar di Kota Solok di perkuat oleh pembangunan manusia yang membuat pola kompetensi partai berjalan dengan stabil sehingga Golkar selalu menjadi partai dengan tingkat volatilitas yang cenderung stabil dan tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dengan partai lainnya, oleh karena itu Golkar mampu meletakkan kader-kadernya di posisi strategis di DPRD Kota Solok. *Kedua*, dominasi politik partai di lembaga Eksekutif Kota Solok periode 1999-2014 terjadi karena partai Golkar merupakan partai lama yang mempunyai kedekatan dengan birokrasi pemerintahan. *Ketiga* Golkar sebagai partai politik memiliki basis masa yang besar terutama pada pemilih dengan usia tua sehingga partai Golkar begitu mengakar di ingatan pemilih Kota Solok.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Diaz Afriasyah (2015), penelitian ini menjelaskan saluran komunikasi yang digunakan oleh partai Demokrat dalam pemilihan legislatif. partai Demokrat memiliki strategi politik dalam berkomunikasi, komunikasi politik yang digunakan adalah saluran tatap muka yang dilakukan untuk kegiatan berkampanye di daerah-daerah dengan ekonomi menengah kebawah, komunikasi ini di anggap lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi lewat dunia massa. Sedangkan komunikasi dunia massa digunakan untuk mencari simpati pemilih dengan ekonomi menengah ke atas seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), strategi ini di pilih karena pemilih di kalangan ini cenderung bersifat apatis terhadap kegiatan politik jika dilakukan secara tatap muka.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, adapun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini menjelaskan legitimasi PKS, PAN dan Demokrat di mata pemilih tahun 2004, 2009, 2014 dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Padang Barat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian

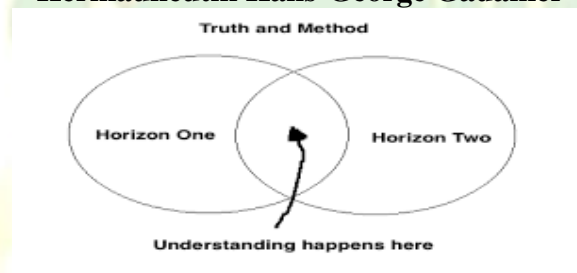
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif, serta memberikan tekanan yang terbuka tentang kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka nantinya akan di peroleh data-data deskriptif yang baik berupa lisan maupun tulisan dari individu maupun kelompok serta perilaku-perilaku yang di amati di lapangan (Moleong, 2002:3).

Tipe penelitian ini adalah kualitatif interpretatif dengan menggunakan metode Hermeneutik dari Hans-George Gadamer, artinya penelitian memfokuskan kepada analisis aktor, pandangan-pandangan atau interpretasi serta tindakan-tindakan yang di pengaruhi oleh teori berada dalam paradigma humanis (Afrizal, 2014:36). Tipe penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, mengungkap sebuah kejadian dan memberikan pemaknaan terhadap peristiwa yang di teliti serta untuk memahami realitas sosial yang di pahami oleh aktor-aktornya. Pandangan ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Gadamer, bahwa *verstehen* terjadi apabila ada peleburan horizon atau cakrawala penafsir

tradisi dengan yang di tafsir tanpa meninggalkan horizon kekinian, peleburan sebagai suatu bentuk kesepahaman yang di dalamnya ada sudut pandang subjektif masa lalu sehingga terbangun suatu pemahaman baru (Hardiman, 193:2015).

Gadamer menjelaskan bahwa penafsir tidak mempunyai cakrawala apabila penafsir tidak melihat cukup jauh dan luas sehingga penilaian-penilaiannya di landasi oleh faktor yang sangat sempit, sebaliknya penafsir yang memiliki cakrawala adalah penafsir yang tidak terkungkung pada pandangan yang sekilas saja namun ia mampu melihat di balik apa yang segera tampak di hadapannya. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Hermauneutik Hans-George Gadamer



Horizon-horizon pemahaman terbuka, bergerak, dan saling melebur
Sumber: Hardiman, 2015:183

Memahami Hermauneutik Gadamer dapat dilakukan melalui langkah pemahaman (*Understanding*), penafsiran (*Interpratation*) dan penerapan (*Application*) karena tugas hermauneutik bukan menghadirkan makna otentik (asli) dalam suatu teks dan mengungkapkan apa yang pernah dikatakan oleh seorang pengarang, namun memahami makna yang ada di balik kata-kata lisan, tulisan, tindakan bahkan ekspresi itu harus diekspresikan dengan mempertimbangkan penerapan dalam konteks zamannya. Sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan dan tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan

legitimasi PKS, PAN, dan Demokrat di mata pemilih Kecamatan Padang Barat, dan menjelaskan penyebab penurunan perolehan suara PKS, PAN, dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukanlah informan. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian (Spradly, 1997:35). Dalam artian lain informan merupakan orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, karena itu informan diharapkan benar-benar orang yang paham dan menguasai masalah yang akan ditanyakan oleh si peneliti (Moleong, 2010: 90).

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sengaja atau *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan informan yang dilakukan peneliti dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus di penuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140). Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pemilih yang sebagai daftar sebagai pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Padang Barat dan individu yang menjadi pengurus aktif dari PKS, PAN dan Demokrat. Tujuan penggunaan teknik *purposive sampling* untuk menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber

untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang di bangun. Oleh karena dalam penelitian ini penulis menetapkan kriteria informan sebagai berikut ini:

1. Informan terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) pada pemilihan legislatif Tahun 2004, 2009 dan 2014 di Kecamatan Padang Barat.
2. Informan ikut menggunakan hak suara dalam dua kali pemilihan legislatif di Kecamatan Padang Barat.
3. Informan berdasarkan rentang usia mulai dari usia 30-65 tahun.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis telah mewawancarai 17 orang informan. Terdiri dari terdiri 10 orang informan pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat, satu orang informan pengurus aktif dari PKS, satu orang informan pengurus aktif dari PAN, satu orang informan pengurus aktif dari partai Demokrat, satu orang informan dari Kecamatan Kuranji, satu orang informan dari Kecamatan Koto Tengah, satu orang informan dari Kecamatan Lubuk Kilangan dan satu orang informan dari Kecamatan Nanggalo. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Data Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan
1	Muhammad Hasbi	46	Jl. Bandar Buat	Pengurus Aktif PAN	SMA
2	Arif	38	Jl. Pisang No. 203 Ujung Gurun	Pedagang	D3
3	Johan	59	Purus 3	Nelayan	SMA
4	Bukari	62	Jl. Berok 1 No 23D Berok Nipah	Tukang Tambal	SMP
5	Amrizal	65	Jl. Pulau Karam Kelurahan Kampung Pondok	Pensiunan	PGA
6	Masril	52	Jl. Samudra No 72 D Kelurahan Olo	Tukang Parkir	SMA

7	Hirul	51	Jl. Hayam Wuruk	Wayanan Mobil	SMP
8	Nasrizal	52	Jl. Siak No.C Rimbo Kaluang	Satpam	S1
9	Awaluddin	53	Jl. Raden Saleh Flamboyan Baru	Wiraswasta	S1
10	Agusman	54	Jl. Permino Kelurahan Kampung Jao	Wiraswasta	SMP
11	Syaiful Darwis	58	Purus 5	Buruh	SMA
12	Gufron S,S	56	Lubuk Lintah	Ketua DPD PKS	S1
13	Jaya Andrian	42	Surau Gadang Nanggalo	Pengurus Aktif Demokrat	S1
14	Oyonizar	47	Kuranji	Buruh	SD
15	Januar	54	Lubuk Kilangan	Wiraswasta	SMA
16	Kardiman	56	Kelurahan Surau Gadang Nanggalo	Pensiunan	S1
17	Zaitun Ikhlas	63	Pasia Nan Tigo, Koto Tengah	Pensiunan	SMA

Sumber: Data Primer 2018

1.6.3 Data Yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang penulis ambil di lapangan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer di peroleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) berdasarkan rumusan dan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan legitimasi PKS, PAN dan Demokrat di mata pemilih Kecamatan Padang Barat dan menjelaskan penyebab penurunan perolehan suara PKS, PAN dan Demokrat dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, 2014 di Kecamatan Padang Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yang relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (KPU), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, dokumentasi dari hasil wawancara di lapangan, *website*/internet, Badan Pusat Statistik (BPS), skripsi, dan jurnal ilmiah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi terlibat, dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014:20). Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini: adalah wawancara mendalam (*In-depth interview*) dan pengumpulan dokumen .

1. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Wawancara mendalam bersifat terbuka, pelaksanaannya tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang telah di dapat sebelumnya (Bungin, 2004:62). Wawancara mendalam (*In-depth interview*) merupakan bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu dengan menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, rekaman, buku catatan, dan kamera (Mulyana, 2008:180). Dalam

penelitian ini yang menjadi informan adalah pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat dan pengurus aktif dari PKS, PAN dan Demokrat.

2. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mencari pembenaran dan memastikan ketepatan informasi yang di dapat melalui proses wawancara mendalam (*In-depth interview*) berupa pencatatan tanggal dan angka-angka tertentu dalam surat atau dokumen, bukti-bukti tertulis untuk memperkuat informasi yang bersumber dari lisan seperti janji-janji, peraturan-peraturan, dan lain-lain (Afrizal, 2014:21).

Tabel 1.7
Teknik Pengumpulan Data

No	Data Yang Diambil	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1	Mendeskripsikan legitimasi PKS, PAN dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat.	Wawancara Mendalam	Pemilih
2	Menjelaskan penyebab penurunan suara PKS, PAN dan Demokrat dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 di Kecamatan Padang Barat.	Wawancara Mendalam	Pengurus aktif partai PKS, PAN, dan Demokrat
3.	Menjelaskan basis suara PKS, PAN dan Demokrat	Wawancara Mendalam	Pemilih

Sumber: Data Primer 2018

1.6.5 Proses Penelitian

Sebelum penulis memulai proses penelitian ini pada tanggal 20 Juli 2018 penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian lapangan di tingkat fakultas yakni Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan kemudian penulis juga mengurus surat izin penelitian ke kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBANGPOL Kota Padang, setelah itu penulis mendatangi Kantor Kecamatan Padang Barat,

DPD PAN, PKS dan DPC Demokrat dengan membawa surat rekomendasi dari kantor KESBANGPOL dan surat dari fakultas dengan tujuan melakukan penelitian mengenai legitimasi partai PKS, PAN dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat, dan untuk melengkapi data yang mendukung untuk ini penelitian ini penulis mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dan kantor Perpustakaan Daerah Kota Padang.

Kemudian pada tanggal 21-22 Juli 2018 dari jam 14:00-17:00 WIB penulis melakukan observasi langsung untuk mengetahui batas-batas wilayah Kecamatan Padang Barat secara administratif yang terdiri dari 10 kelurahan yaitu Kelurahan Belakang Tangsi, Kelurahan Olo, Kelurahan Ujung Gurun, Kelurahan Berok Nipah, Kelurahan Kampuang Pondok, Kelurahan Kampuang Jao, Kelurahan Purus, Kelurahan Padang Pasir, Kelurahan Rimbo Kaluang dan Kelurahan Flamboyan Baru. Proses wawancara dengan informan dilakukan pada hari senin tanggal 23 Juli sampai 10 Agustus 2018, dalam proses penelitian pemilih di Padang Barat umumnya terbuka untuk memberikan tanggapan tentang keterlibatan dirinya dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014, namun ada beberapa kendala yang penulis hadapi dalam proses mewawancarai pemilih. *Pertama*, informan yang bersedia untuk di wawancarai mayoritas kaum laki-laki saja karena penelitian ini membahas tentang isu-isu politik. *Kedua* ada informan yang menyatakan bahwa penetapan pilihan tidak bisa di ungkapkan karena bersifat rahasia dan pribadi. *Ketiga*, di temui pula informan yang

mengatakan bahwa tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai pemilihan umum. *Keempat*, umumnya di Kecamatan Padang Barat merupakan pusat perdagangan dan industri rumahan sehingga penulis kesulitan untuk informan jika penelitian dilakukan pada siang hari.

Sembari melakukan wawancara dengan pemilih, penulis juga melakukan wawancara dengan pengurus aktif PAN, dan PKS. Kader partai memberikan respon positif dan bersedia untuk penulis wawancarai meskipun penulis harus menyesuaikan jadwal wawancara berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk kader yang tergabung dalam kepengurusan dari partai Demokrat, penulis tidak mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai kesediaan dari kader partai untuk di wawancarai, setelah menunggu beberapa hari akhirnya penulis memutuskan kembali mendatangi kantor DPC Demokrat untuk bertemu langsung dengan kader partai yang tergabung sebagai pengurus partai untuk menanyakan kembali kesediaan kader partai untuk di wawancarai. Selanjutnya penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang telah penulis dapatkan di lapangan, pengelompokan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan dari penelitian dan proses selanjutnya penulis membuat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan sehingga hasil yang di peroleh dapat disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Pada tanggal 11-14 September 2018 penulis kembali melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Nanggalo untuk memastikan kembali basis pemilih dari PKS, PAN, dan Demokrat di masing-masing kecamatan tersebut sesuai dengan

informasi yang telah penulis dapatkan mengenai basis suara partai dari kader partai PKS, PAN dan Demokrat. Meskipun dalam penelitian ini mengalami beberapa kendala baik itu dari pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat maupun dari kader yang menjadi pengurus aktif partai tetapi penelitian ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semestinya.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan objek yang diteliti dengan menentukan kriteria-kriteria sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Padang Barat dan pengurus aktif PKS, PAN dan Demokrat.

1.6.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Menurut Moleong analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga mudah di interpretasikan dan di pahami (Moleong, 2002:103). Pada penelitian ini analisis data yang digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, *pertama* proses ketegorisasi data dengan menemukan pola atau tema-tema dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data (Afrizal, 2014:180). *Kedua*, Data yang di dapat di lapangan di catat dalam bentuk catatan lapangan dan di analisis membentuk suatu pola, kategori, dan hubungan berbagai konsep yang dibutuhkan. *Ketiga*, penarik kesimpulan data disajikan dalam bentuk hubungan pola, kategori,

dan konsep yang di dapat, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk hasil analisis data.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang di pakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah proses pemahaman. Defenisi operasional konsep berisikan informasi ilmiah yang membantu penulis dalam menjabarkan konsep-konsep digunakan dalam penelitian ini dan untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep-konsep rujukan:

1. Legitimasi seberapa jauh pemilih menerima dan mengakui kewewenangan partai-partai politik.
2. Partai politik suatu organisasi yang di bentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam perebutan kekuasaan dan jabatan.
3. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Penurunan suara merupakan rendahnya hasil rekapitulasi suara yang di peroleh oleh partai politik dalam pemilihan umum.
5. Memahami pengalaman di alog dengan yang lain dalam keberlainannya.
6. Pemilih merupakan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun baik sudah ataupun belum kawin (UU No. 8 Tahun 2012).

1.6.9 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Berdasarkan dari hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang bahwa perolehan suara yang di peroleh oleh partai PKS, PAN, dan Demokrat dari tahun 2004, 2009 dan 2014 mengalami penurunan suara yang signifikan jika dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Padang, pemilih paling heterogen dan kosmopolitan.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan terhitung dari Juli sampai dengan Agustus 2018, kemudian dilanjutkan dengan penulisan karya ilmiah (skripsi). Berikut adalah rincian kegiatan dalam penelitian dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.8
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2018					
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt
1	Mengurus Surat Izin Penelitian	■					
2	Membuat Pedoman Wawancara	■	■				
3	Penelitian Lapangan			■	■		
4	Analisis data -Kodifikasi data -Penyajian data			■	■		
5	Penulisan Draft Skripsi					■	
6	Ujian skripsi						■

Sumber: Data Primer 2018